

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,  
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, BKKBN DAN BNP2TKI)**

---

Tahun Sidang	:	2007-2008
Masa Persidangan	:	III
Jenis	:	Rapat Kerja
Dengan	:	Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Sifat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Senin, 25 Februari 2008
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta.
Acara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membicarakan masalah-masalah aktual di masyarakat yang berhubungan dengan bidang tugas Depnakertrans RI;</li><li>2. Membicarakan hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008;</li><li>3. Lain-lain.</li></ol>
Ketua Rapat	:	dr. Ribka Tjiptaning / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	:	Dra. Tri Udiartiningrum / Kabag Set. Komisi IX DPR RI
Anggota yang hadir	:	36 Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI Ijin 5 orang, sakit 1 orang.

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dibuka pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Paparan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI mengenai realisasi kinerja DEPNAKERTRANS tahun 2007 dan target harapan pada tahun 2008, tindak lanjut kunjungan kerja serta masalah-masalah lain yang menyangkut bidang tugas DEPNAKERTRANS.

## KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Setelah mendengar usulan/pendapat dari Anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, maka kesimpulan dari Rapat Kerja hari ini, yaitu :

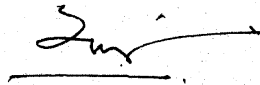
1. Komisi IX DPR R.I mendorong DEPNAKERTRANS R.I untuk melakukan upaya-upaya optimalisasi kinerja agar penghematan 15% APBN 2008 tidak berdampak negatif pada seluruh target renstra DEPNAKERTRANS.
2. Komisi IX DPR R.I dan DEPNAKERTRANS R.I sependapat bahwa alokasi APBN untuk anggaran pendidikan nasional seharusnya dapat membiayai program pendidikan pelatihan kerja, untuk implementasinya agar DEPNAKERTRANS dapat berkoordinasi dengan DEPDIKNAS agar program peningkatan kompetensi tenaga kerja dapat berjalan optimal.
3. Komisi IX DPR R.I mendukung upaya DEPNAKERTRANS R.I untuk merevitalisasi pengawasan ketenagakerjaan secara keseluruhan dan khususnya program pengawasan yang terfokus pada upaya pencegahan kecelakaan di tempat kerja dan mendorong DEPNAKERTRANS untuk meningkatkan upaya perlindungan hak-hak pekerja, termasuk pekerja sektor informal.
4. Komisi IX DPR R.I meminta DEPNAKERTRANS R.I untuk berperan aktif dan bertindak tegas dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran norma ketenagakerjaan dan perselisihan hubungan industrial di seluruh Indonesia termasuk di dalamnya perselisihan di Bank Mandiri, Bank Tokyo Mitsubishi dan PT Hutan Sawit Lestari-CTP, Ketapang dan PT Jakarta International Terminal Container (JITC), Exxon Mobile dan lain-lainnya.
5. Komisi IX DPR R.I mendukung program pembangunan KTM yang dilakukan selama 2007 dan mendukung rencana kerja sama DEPNAKERTRANS R.I dengan DEPARTEMEN KEHUTANAN R.I dalam Program Pembangunan KTM-HTR tahun 2008, agar program ini mendapat dukungan dari daerah diminta agar DEPNAKERTRANS mensosialisasikan Program KTM-HTR.
6. Komisi IX DPR R.I mendorong DEPNAKERTRANS R.I untuk meningkatkan kerjasama lintas Departemen agar program pembangunan ketransmigrasian dapat semakin ditingkatkan pada masa yang akan datang, terutama untuk wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar yang belum dijangkau secara maksimal.
7. Komisi IX DPR R.I mendesak DEPNAKERTRANS R.I untuk terus melakukan perbaikan kualitas sistem pelayanan penempatan TKI dan meningkatkan pengawasan terhadap konsorsium asuransi TKI agar dapat memberikan perlindungan konkrit bagi TKI terutama pada masa penempatan TKI di luar negeri.
8. Komisi IX DPR R.I mendesak DEPNAKERTRANS R.I agar bekerja sama dengan PT Jamsostek melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek baik sektor formal maupun informal.

9. Komisi IX DPR RI mendesak DEPNAKERTRANS bersama pihak terkait lainnya untuk mencari jalan keluar terhadap realisasi pembayaran hak-hak mantan karyawan PT Timah dan PT Dirgantara Indonesia.

**Rapat ditutup pukul 14.30. WIB**

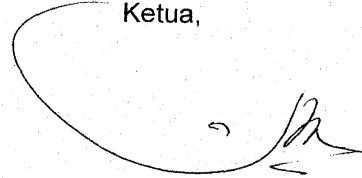
Jakarta, 25 Februari 2008

Menteri Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi RI,



**Erman Suparno**

Komisi IX DPR RI  
Ketua,



**dr. Ribka Tjiptaning**